



Inspektorat Daerah

RENJA PERUBAHAN

Inspektorat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

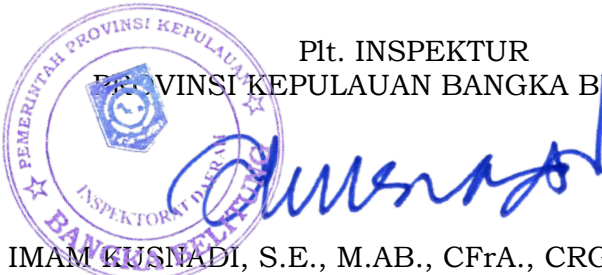
Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Perubahan dibuat dengan mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan bulan Mei 2025 atau di Triwulan II. Dokumen tersebut disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Penyajian dokumen perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 telah diupayakan secara optimal, namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, beserta seluruh aspek yang berkaitan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, ditengah akselerasi dinamika perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat cepat dan kompleks.

Pangkalpinang, Mei 2025

Plt. INSPEKTUR
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFrA., CRGP., CGCAE.
NIP. 197506092008121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN..... 3

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN3

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN4

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH7

BAB II..... 8

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 8

2.1. EVALUASI KINERJA SASARAN8

2.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN9

BAB III..... 10

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 10

BAB IV 14

PENUTUP 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk:

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektivitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal;

- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Selain itu, adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025 diejawantahkan dalam surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tanggal 24 April 2025 yang menegaskan efisiensi yang juga dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama triwulan I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan serta pergeseran pagu anggaran.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Daerah Tahun 2023 serta menjadi dasar Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Salah satu sasaran dalam prioritas pendukung yang ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan strategi:

- a. peningkatan akses data dan informasi serta kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat; dan
- b. peningkatan transparansi dan layanan pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem manajemen pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Penyusunan perubahan Renja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mendasarkan pada peraturan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 - m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
 - o. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 - p. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I +- tahun berjalan sebagaimana tabel evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.2

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran *output* kegiatan, penambahan/pengurangan kegiatan baru dan/atau alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (tabel 3.1)

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI KINERJA SASARAN

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah:

1. **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang diukur dengan indikator sasaran “Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di Bawah 5%” dan “Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP”.
Di tahun 2023, indikator sasaran tersebut tercapai dengan nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5% dan Nilai Hasil Kapabilitas APIP serta hasil evaluasi Maturitas SPIP masing-masing berada pada level 3. Di tahun 2025, target kinerja untuk sasaran strategis ini, masing-masing sebesar 2% dan pada level 3.
2. **Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat**, dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)”. Di tahun 2023, indikator sasaran ini memiliki target 78, dan tercapai sebesar 80,30. Untuk tahun 2025, target kinerja untuk sasaran strategis ini sebesar 79.

Adapun dalam bentuk tabel, dapat kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Sasaran Inspektorat	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di Bawah 5%	0.001%	2%
	Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	78	80,30	79

2.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 3 (tiga) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran tujuan, visi serta misi kegiatan telah berjalan dengan baik secara garis besar. Adapun evaluasi sampai dengan Triwulan I (per 14 Mei 2025) dapat dilihat secara rinci pada tabel 2.2.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, total rata-rata capaian kinerja dari seluruh program dan rata-rata capaian anggaran dari seluruh program masih pada kisaran di bawah 20% . Kedua capaian tersebut masuk dalam kategori Sangat Rendah. Dengan adanya informasi tersebut, diperlukan adanya penyesuaian terhadap anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan anggaran bersifat efektif dan efisien.

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Targe Renja PD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target		Renja PD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan Renja PD 2025 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17
1		Urusan Pengawasan							Rp28.457.364.597,00	Rp28.457.364.597,00	Rp24.896.370.230,00	-Rp3.560.994.367,00		APBD		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			94,77	100			Rp23.212.320.097,00	Rp23.212.320.097,00	Rp22.197.520.570,00	-Rp1.014.799.527,00		APBD		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,85	100			Rp52.731.000,00	Rp52.731.000,00	Rp38.245.200,00	-Rp14.485.800,00		APBD		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		37,29	100	12	12	Rp27.281.200,00	Rp27.281.200,00	Rp17.921.200,00	-Rp9.360.000,00		APBD		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		29,75	100	12	12	Rp25.449.800,00	Rp25.449.800,00	Rp20.324.000,00	-Rp5.125.800,00		APBD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			96,07	100			Rp17.407.205.897,00	Rp17.407.205.897,00	Rp17.290.163.670,00	-Rp117.042.227,00		APBD		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		96,07	100	105	105	Rp17.382.580.897,00	Rp17.382.580.897,00	Rp17.275.538.670,00	-Rp107.042.227,00		APBD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)		-	100	4	4	Rp24.625.000,00	Rp24.625.000,00	Rp14.625.000,00	-Rp10.000.000,00		APBD		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28,12	100			Rp1.600.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	Rp1.293.700.000,00	-Rp306.300.000,00		APBD		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		28,12	100	64	64	Rp1.600.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	Rp1.293.700.000,00	-Rp306.300.000,00		APBD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			99,91	100			Rp649.562.700,00	Rp649.562.700,00	Rp513.474.600,00	-Rp136.088.100,00		APBD		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		99,93	100	12	12	Rp30.933.400,00	Rp30.933.400,00	Rp30.933.400,00	Rp0,00		APBD		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		99,95	100	2	2	Rp78.300.000,00	Rp78.300.000,00	Rp78.300.000,00	Rp0,00		APBD		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Targe Renja PD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target		Renja PD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan Renja PD 2025 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		97,60	100	12	12	Rp7.508.400,00	Rp7.508.400,00	Rp7.508.400,00	Rp0,00		APBD		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		100,00	100	12	12	Rp24.968.200,00	Rp24.968.200,00	Rp24.968.200,00	Rp0,00		APBD		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		99,62	100	12	12	Rp33.111.400,00	Rp33.111.400,00	Rp19.727.200,00	-Rp13.384.200,00		APBD		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		100,00	100	12	12	Rp15.840.000,00	Rp15.840.000,00	Rp15.840.000,00	Rp0,00		APBD		
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		99,86	100	12	12	Rp144.991.300,00	Rp144.991.300,00	Rp122.287.400,00	-Rp22.703.900,00		APBD		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		100,00	100	12	12	Rp113.910.000,00	Rp113.910.000,00	Rp113.910.000,00	Rp0,00		APBD		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	100	12	12	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp100.000.000,00	-Rp100.000.000,00		APBD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100			Rp1.739.824.900,00	Rp1.739.824.900,00	Rp1.428.269.500,00	-Rp311.555.400,00		APBD		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		-	100	3	3	Rp150.264.400,00	Rp150.264.400,00	Rp126.287.000,00	-Rp23.977.400,00		APBD		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		97,43	100	24	24	Rp1.474.686.700,00	Rp1.474.686.700,00	Rp1.208.067.500,00	-Rp266.619.200,00		APBD		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	100	3	3	Rp114.873.800,00	Rp114.873.800,00	Rp93.915.000,00	-Rp20.958.800,00		APBD		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91,12	100			Rp1.058.860.100,00	Rp1.058.860.100,00	Rp1.163.260.100,00	Rp104.400.000,00		APBD		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		65,34	100	12	12	Rp23.345.000,00	Rp23.345.000,00	Rp23.345.000,00	Rp0,00		APBD		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Targe Renja PD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target		Renja PD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan Renja PD 2025 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		48,23	100	12	12	Rp275.900.000,00	Rp275.900.000,00	Rp275.900.000,00	Rp0,00		APBD		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		98,04	100	12	12	Rp76.311.100,00	Rp76.311.100,00	Rp76.311.100,00	Rp0,00		APBD		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		100,00	100	12	12	Rp683.304.000,00	Rp683.304.000,00	Rp787.704.000,00	Rp104.400.000,00		APBD		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97,39	100			Rp704.135.500,00	Rp704.135.500,00	Rp470.407.500,00	-Rp233.728.000,00		APBD		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		78,06	100	7	7	Rp144.918.000,00	Rp144.918.000,00	Rp111.092.500,00	-Rp33.825.500,00		APBD		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		79,50	100	12	12	Rp63.040.000,00	Rp63.040.000,00	Rp63.040.000,00	Rp0,00		APBD		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		98,94	100	2	2	Rp496.177.500,00	Rp496.177.500,00	Rp296.275.000,00	-Rp199.902.500,00		APBD		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			86,80	100			Rp4.420.080.600,00	Rp4.420.080.600,00	Rp2.240.464.760,00	-Rp2.179.615.840,00		APBD		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			88,43	100			Rp3.920.090.400,00	Rp3.920.090.400,00	Rp1.966.815.160,00	-Rp1.953.275.240,00		APBD		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		81,46	100	64	64	Rp1.073.018.100,00	Rp1.073.018.100,00	Rp531.866.000,00	-Rp541.152.100,00		APBD		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		95,32	100	68	68	Rp1.248.388.300,00	Rp1.248.388.300,00	Rp638.347.260,00	-Rp610.041.040,00		APBD		
		Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		100,00	100	68	68	Rp299.992.800,00	Rp299.992.800,00	Rp153.488.100,00	-Rp146.504.700,00		APBD		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Targte Renja PD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target		Renja PD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan Renja PD 2025 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17
		Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		99,34	100	68	68	Rp249.986.000,00	Rp249.986.000,00	Rp127.509.000,00	-Rp122.477.000,00		APBD		
		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)		74,91	100	7	7	Rp374.995.200,00	Rp374.995.200,00	Rp198.490.800,00	-Rp176.504.400,00		APBD		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		99,80	100	64	64	Rp673.710.000,00	Rp673.710.000,00	Rp317.114.000,00	-Rp356.596.000,00		APBD		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			54,02	100			Rp499.990.200,00	Rp499.990.200,00	Rp273.649.600,00	-Rp226.340.600,00		APBD		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		54,02	100	12	12	Rp499.990.200,00	Rp499.990.200,00	Rp273.649.600,00	-Rp226.340.600,00		APBD		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			86,29	100			Rp824.963.900,00	Rp824.963.900,00	Rp458.384.900,00	-Rp366.579.000,00		APBD		
		Pendampingan dan Asistensi			93,28	100			Rp824.963.900,00	Rp824.963.900,00	Rp458.384.900,00	-Rp366.579.000,00		APBD		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)		98,32	100	2	2	Rp149.991.400,00	Rp149.991.400,00	Rp86.754.400,00	-Rp63.237.000,00		APBD		
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		99,06	100	2	2	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp54.000.000,00	-Rp46.000.000,00		APBD		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		95,43	100	6	6	Rp324.995.000,00	Rp324.995.000,00	Rp178.365.000,00	-Rp146.630.000,00		APBD		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Targte Renja PD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target		Renja PD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Perubahan Renja PD 2025 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)		84,58	100	4	4	Rp249.977.500,00	Rp249.977.500,00	Rp139.265.500,00	-Rp110.712.000,00		APBD		

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 050/0001.a/BAPPEDA tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka organisasi perangkat daerah (OPD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan ini juga memedomani Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tanggal 24 April 2025 Hal Tindak Lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2025.

Dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mendukung dalam implementasi Asta Cita serta program dan kegiatan yang menjadi prioritas. Adapun bentuk dukungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Dukungan Inspektorat dalam Asta Cita.

NO	Asta Cita	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	(7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Reviu Laporan Kinerja
				Reviu Laporan Keuangan

NO	Asta Cita	Program	Kegiatan	Subkegiatan
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 3.2. Dukungan Inspektorat dalam Program Prioritas Gubernur.

NO	Program Prioritas Gubernur	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	(11) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Reviu Laporan Kinerja
				Reviu Laporan Keuangan
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

NO	Program Prioritas Gubernur	Program	Kegiatan	Subkegiatan
				Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2025					SIPD (Pagu Anggaran Setelah Efisiensi)	Efisiensi
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH						Rp26.776.014.597,00	Rp1.681.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.457.364.597,00		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp26.776.014.597,00	Rp1.681.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.457.364.597,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	Rp26.776.014.597,00	Rp1.681.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.457.364.597,00	Rp 24.896.370.230,00	-Rp3.560.994.367,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp21.530.970.097,00	Rp1.681.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.212.320.097,00	Rp 22.197.520.570,00	-Rp1.014.799.527,00
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp52.731.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.731.000,00	Rp 38.245.200,00	-Rp14.485.800,00
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp27.281.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.281.200,00	Rp 17.921.200,00	-Rp9.360.000,00
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp25.449.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.449.800,00	Rp 20.324.000,00	-Rp5.125.800,00
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp17.407.205.897,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.407.205.897,00	Rp 17.290.163.670,00	-Rp117.042.227,00
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp17.382.580.897,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.382.580.897,00	Rp 17.275.538.670,00	-Rp107.042.227,00
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp24.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.625.000,00	Rp 14.625.000,00	-Rp10.000.000,00
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp1.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000.000,00	Rp 1.293.700.000,00	-Rp306.300.000,00
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp1.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000.000,00	Rp 1.293.700.000,00	-Rp306.300.000,00
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp649.562.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp649.562.700,00	Rp 513.474.600,00	-Rp136.088.100,00
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp30.933.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.933.400,00	Rp 30.933.400,00	Rp0,00
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp78.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.300.000,00	Rp 78.300.000,00	Rp0,00
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp7.508.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.508.400,00	Rp 7.508.400,00	Rp0,00
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp24.968.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.968.200,00	Rp 24.968.200,00	Rp0,00
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp33.111.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.111.400,00	Rp 19.727.200,00	-Rp13.384.200,00
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp15.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.840.000,00	Rp 15.840.000,00	Rp0,00
6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp144.991.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.991.300,00	Rp 122.287.400,00	-Rp22.703.900,00
6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp113.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.910.000,00	Rp 113.910.000,00	Rp0,00
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp 100.000.000,00	-Rp100.000.000,00
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp58.474.900,00	Rp1.681.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.824.900,00	Rp 1.428.269.500,00	-Rp311.555.400,00
6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp150.264.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.264.400,00	Rp 126.287.000,00	-Rp23.977.400,00
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp58.474.900,00	Rp1.416.211.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.474.686.700,00	Rp 1.208.067.500,00	-Rp266.619.200,00
6	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp114.873.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.873.800,00	Rp 93.915.000,00	-Rp20.958.800,00
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.058.860.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.058.860.100,00	Rp 1.163.260.100,00	Rp104.400.000,00
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp23.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.345.000,00	Rp 23.345.000,00	Rp0,00
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp275.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.900.000,00	Rp 275.900.000,00	Rp0,00

Urutan		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2025					SIPD (Pagu Anggaran Setelah Efisiensi)	Efisiensi
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
6		01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp76.311.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.311.100,00	Rp76.311.100,00	Rp0,00
6		01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp683.304.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp683.304.000,00	Rp787.704.000,00	Rp104.400.000,00
6		01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp704.135.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.135.500,00	Rp470.407.500,00	-Rp233.728.000,00
6		01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp144.918.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.918.000,00	Rp111.092.500,00	-Rp33.825.500,00
6		01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp63.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.040.000,00	Rp63.040.000,00	Rp0,00
6		01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp496.177.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.177.500,00	Rp296.275.000,00	-Rp199.902.500,00
6		01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp4.420.080.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.420.080.600,00	Rp2.240.464.760,00	-Rp2.179.615.840,00
6		01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp3.920.090.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.920.090.400,00	Rp1.966.815.160,00	-Rp1.953.275.240,00
6		01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp1.073.018.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.073.018.100,00	Rp531.866.000,00	-Rp541.152.100,00
6		01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp1.248.388.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.248.388.300,00	Rp638.347.260,00	-Rp610.041.040,00
6		01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Rp299.992.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.992.800,00	Rp153.488.100,00	-Rp146.504.700,00
6		01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Rp249.986.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.986.000,00	Rp127.509.000,00	-Rp122.477.000,00
6		01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp374.995.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp374.995.200,00	Rp198.490.800,00	-Rp176.504.400,00
6		01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp673.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.710.000,00	Rp317.114.000,00	-Rp356.596.000,00
6		01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp499.990.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.990.200,00	Rp273.649.600,00	-Rp226.340.600,00
6		01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp499.990.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.990.200,00	Rp273.649.600,00	-Rp226.340.600,00
6		01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp824.963.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp824.963.900,00	Rp458.384.900,00	-Rp366.579.000,00
6		01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Rp824.963.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp824.963.900,00	Rp458.384.900,00	-Rp366.579.000,00
6		01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp149.991.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.991.400,00	Rp86.754.400,00	-Rp63.237.000,00
6		01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp54.000.000,00	-Rp46.000.000,00
6		01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp324.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.995.000,00	Rp178.365.000,00	-Rp146.630.000,00
6		01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp249.977.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.977.500,00	Rp139.265.500,00	-Rp110.712.000,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai bulan Mei 2025 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya, memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai, memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra Inspektorat Daerah 2023-2026 selama 4 (empat) tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Mei 2025

Plt. INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFrA., CRGP., CGCAE.
NIP. 197506092008121001